

BAB III

PERAN DEWAN KEAMANAN PBB

Dalam bab ini akan di jelaskan mengenai peran seperti apa yang ditunjukkan oleh Dewan Keamanan PBB dalam menjalankan tugasnya sebagai penjaga perdamaian dunia. Penulis juga akan menjabarkan upaya apa yang telah dilakukan oleh DK PBB terkait mengatasi permasalahan nuklir Korea Utara. Selain itu, penulis juga akan sedikit menyinggung tentang keterkaitan dari aktor dominan yang mengontrol jalan dari rezim itu sendiri.

3.1 Dewan Keamanan PBB

Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang biasa disingkat PBB adalah sebuah organisasi internasional yang memiliki pengaruh yang cukup besar dalam sejarah tumbuh pesatnya kerjasama diantara beberapa bangsa di dunia dan mencakup hampir di berbagai aspek kehidupan internasional.¹³⁷ PBB sendiri lahir atas dasar kesadaran beberapa negara tentang pentingnya memelihara perdamaian, dimana semua orang bebas dari ancaman agresi, dapat menikmati ketentraman ekonomi dan sosial. Atas dasar itulah mereka menyatakan bersedia untuk bekerja sama demi tujuan itu dan bersedia bekerja sama dengan bangsa-bangsa lainnya dalam

¹³⁷ Sumaryo Suryokusumo, 1987, *Organisasi Internasional*, Jakarta: UI-Press, hal. 1, dalam, Marupa Hasudungan Sianturi, *Peran PBB Sebagai Organisasi Internasional Dalam Menyelesaikan Sengketa Yurisdiksi Negara Anggotanya Dalam Kasus State Immunity Antara Jerman Dengan Italia Terkait Kejahatan Perang Nazi*, diakses dalam <https://media.neliti.com/media/publications/14991-ID-peran-pbb-sebagai-organisasi-internasional-dalam-menyelesaikan-sengketa-yurisdik.pdf> (2/2/2019, 00:56 WIB)

masa perang maupun damai.¹³⁸ Perserikatan Bangsa-Bangsa sendiri resmi didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945, dan disahkan oleh China, Uni Soviet, Inggris, Perancis dan Amerika Serikat.¹³⁹ Setelah diresmikan, maka disusunlah beberapa organ-organ pokok dalam PBB itu sendiri, yang di antaranya adalah Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Perwalian, Mahkamah Internasional dan Sekretariat. Selain itu dibentuk pula beberapa organisasi lain yang didirikan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dalam menangani isu atau permasalahan tertentu, beberapa diantaranya seperti WHO (*World Health Organization*) yang menangani bidang kesehatan, UNICEF (*United Nations Children's Fund*) yang menangani bidang pendidikan dan kebudayaan, UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*) yang menangani bidang pengungsi, dan beberapa organisasi lainnya yang berada dalam naungan PBB.¹⁴⁰

Terkait masalah keanggotaan dalam PBB, terdapat kurang lebih 193 negara yang saat ini terdaftar sebagai anggota dari PBB dan sebagai anggota tentunya mereka juga terikat oleh beberapa peraturan yang berlaku dalam PBB itu sendiri. Segala aturan yang berlaku dalam PBB tertuang pada Piagam PBB yang tentunya menjadi bahan acuan bagi setiap anggota. Sebagai contoh yang dimuat pada Pasal 2 Piagam PBB yang berisikan sebagai berikut:¹⁴¹

¹³⁸ Drs. Teuku May Rudy, SH., MIR., M.Sc., 2009, *Administrasi dan Organisasi Internasional*, Edisi Kedua, Bandung: Refika Aditama, hal. 46

¹³⁹ *Ibid.*, hal. 57

¹⁴⁰ *Ibid.*, hal. 60

¹⁴¹ Susan Gustina, *Peran Dewan Keamanan PBB Dalam Penyelesaian Konflik Israel-Palestina (Studi Kasus Resolusi Keamanan PBB Nomor 1860 Tahun 2009)*, Skripsi, Padang: Jurusan Hukum, Universitas Andalas, Hal. 21

1. PBB hadir berdasarkan pada asas persamaan kedaulatan semua anggotanya
2. PBB berkewajiban untuk memenuhi tugas dan fungsinya sesuai dengan apa yang tercantum dalam Piagam
3. Segala jenis perselisihan harus dapat diselesaikan secara damai agar perdamaian dan keamanan tidak terancam
4. Segala jenis tindakan kekerasan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik suatu negara harus dihindarkan
5. Para anggota diwajibkan untuk membantu PBB terhadap setiap kegiatan sesuai dengan Piagam PBB dan dilarang untuk membantu negara yang oleh PBB dikenakan tindakan-tindakan pencegahan dan pemaksaan
6. Untuk negara bukan anggota PBB diwajibkan untuk bertindak sesuai dengan Piagam PBB apabila dianggap perlu untuk menjaga kestabilan perdamaian dan keamanan internasional
7. PBB tidak akan mencampuri terhadap masalah persoalan dalam negeri (*domestic jurisdiction*) dari negara-negara anggotanya.

Dewan Keamanan PBB atau DK PBB merupakan satu dari sekian banyak contoh rezim yang berkembang di era globalisasi saat ini. Di dalam keanggotaan Dewan Keamanan PBB hadir 15 negara anggota yang 5 diantaranya berstatus sebagai anggota tetap yaitu Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Rusia, dan China. Untuk negara anggota tetap itu sendiri adalah mereka yang memiliki hak istimewa atau yang akrab di sebut dengan hak veto, yang tentunya hal itu akan dapat

membuat segala yang tidak mungkin bisa dengan mudah mereka tetapkan dengan menggunakan hak istimewa tersebut. Dewan keamanan PBB memiliki beberapa wewenang yaitu:¹⁴²

1. Menjamin agar seluruh anggota PBB dapat menjalankan tugasnya dengan baik
2. Menjalankan setiap tugas-tugasnya untuk memulihkan perdamaian dan keamanan internasional atas nama negara-negara anggota
3. Mampu untuk menyelesaikan pertikaian internasional secara damai.
4. Mampu untuk menentukan tindakan-tindakan apa yang perlu ditempuh terhadap berbagai hal yang sekiranya dapat mengancam perdamaian dunia.
5. Menegakan keutuhan dengan memperkecil atau mengurangi skala persenjataan
6. Berkewajiban untuk mampu menyampaikan setiap laporan-laporan tahunan dan laporan-laporan khusus kepada majelis umum untuk dipertimbangkan

3.2 Upaya Dewan Keamanan PBB Dalam Denuklirisasi Korea Utara

Seperti yang telah di jelaskan sebelumnya bahwa DK PBB memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjamin kestabilan keamanan internasional. Salah satu isu atau permasalahann keamanan yang di tangani oleh Dk PBB adalah terkait isu nuklir milik Korea Utara. Permasalahan ini merupakan isu yang telah lama

¹⁴² Narsif, 2007, *Hukum Organisasi Internasional*, Fakultas Hukum Padang, Hal. 63, dalam Susan Gustina, *Op. Cit.*, Hal. 21

berkembang dan hingga beberapa waktu masih belum kunjung menemui titik penyelesaian. Sebagai salah satu bentuk usahanya dalam menjaga perdamaian, DK PBB telah berusaha untuk melakukan perundingan dengan pihak Korea Utara, namun hasilnya tetap nihil. Dalam hal ini DK PBB terus memaksa Korea Utara untuk menyerah pada seluruh keahlian teknologi yang diperolehnya selama bertahun-tahun dalam pengoperasian rudalnya, yang sebagai imbalannya Korea Utara akan menerima berbagai bantuan dari PBB.¹⁴³ Namun sangat disayangkan, Korea Utara tidak gampang mengubah pikirannya dan tetap mempertahankan program nuklirnya sebab bagi mereka senjata nuklir telah menjadi aset penting dalam hidup dan sudah seperti sebuah ‘asuransi jiwa’.¹⁴⁴

Dunia semakin dibuat khawatir dengan kemampuan nuklir Korea Utara yang terus menunjukkan perkembangan yang pesat seiring berjalannya waktu, ditambah dengan seringnya negara itu melakukan percobaan nuklir. Meskipun telah beberapa kali mendapat kecaman dari berbagai pihak, negara yang di pimpin oleh Kim Jong-Un tersebut seolah selalu menutup telinga dan terus melakukan uji coba nuklirnya. Karena dirasa dapat mengancam kestabilan keamanan internasional, DK PBB terpaksa menjatuhkan sanksi keras terhadap Korea Utara. Berikut ini adalah beberapa sanksi yang dijatuhkan untuk Korea Utara:

Tabel 3.1 Resolusi Sanksi DK PBB

Resolusi DK PBB	Isi Dari Resolusi
Resolusi 1718 (2006)	Resolusi ini mayoritas berisi seputar paksaan yang mewajibkan Korea Utara untuk berhenti melakukan uji coba nuklir, berhenti meluncurkan rudal balistik, serta meninggalkan semua program nuklirnya. Dewan Keamanan juga memberlakukan larangan ekspor dan impor produk

¹⁴³ Robert Vanderneulebroucke, *Alleviating International Tensions On The Korean Peninsula – A Blueprint*, International Journal On World Peace, Vol. 34, No. 4 (Desember 2017), Saint Paul: Professors World Peace Academy, hal. 2

¹⁴⁴ *Ibid.*

	militer Korea Utara. Tidak hanya itu, negara-negara anggota PBB juga diwajibkan untuk segera membekukan setiap aset dari setiap individu maupun perusahaan Korea Utara yang terdeteksi ikut terlibat dalam program nuklir.
Resolusi 1874 (2009)	Isi resolusi ini memperluas keputusan untuk melarang adanya senjata nuklir dan melarang adanya kegiatan ekspor maupun impor senjata. Selain itu negara-negara anggota ditugaskan untuk memeriksa kargo milik Korea Utara jika muatan tersebut dicurigai memiliki muatan barang terlarang. Resolusi ini juga melarang setiap negara untuk memberikan dukungan finansial pada Korea Utara yang berkaitan dengan nuklir, rudal balistik, atau kegiatan yang berhubungan dengan senjata pemusnah masal lainnya.
Resolusi 2087 (2013)	Resolusi ini meminta seluruh negara agar tetap waspada dalam memantau setiap individu maupun entitas yang terkait dengan rezim Korea Utara. Selain itu setiap negara juga berhak untuk menyita maupun menghancurkan materi yang diduga menuju atau dari Korea Utara.
Resolusi 2094 (2013)	Resolusi ini memperluas sejumlah langkah-langkah sanksi pada resolusi sebelumnya, seperti menambahkan teknologi nuklir, rudal ganda serta barang-barang mewah lainnya ke dalam daftar impor yang dilarang. Resolusi tersebut bertujuan untuk mempersulit Korea Utara dalam mengembangkan program rudal dan balistik dengan cara menghalangi akses transfer tunai serta peralatan canggih lainnya yang sekiranya di perlukan dalam pembuatan senjata nuklir dan pengayaan uranium. Resolusi ini juga kembali meminta negara-negara anggota untuk memeriksa dan menahan setiap kargo yang mencurigakan dari Korea Utara yang transit di wilayah mereka. Selain itu negara anggota juga diminta untuk meningkatkan kewaspadaan mereka pada utusan diplomatik Korea Utara yang berada di kawasan mereka.
Resolusi 2270 (2016)	Resolusi ini melarang setiap negara untuk mengajar maupun memberi pelatihan khusus kepada warga Korea Utara dalam disiplin ilmu yang berkaitan dengan senjata pemusnah masal. Ditekankan pula bahwa pada kenyataannya Korea Utara telah mengabaikan kebutuhan pokok rakyatnya dan hanya memprioritaskan pengembangan nuklir dan program rudal balistiknya. Oleh karena itu DK PBB bersama negara anggota lainnya sepakat untuk semakin memperketat sanksi yang diberikan pada Korea Utara. Negara itu dilarang untuk memproduksi senjata apapun termasuk jenis senjata kecil dan ringan sekalipun. DK PBB juga melarang setiap negara untuk memasok berbagai bahan bakar kepada Korea Utara agar tidak dialihkan pada program rudal balistiknya.
Resolusi 2321 (2016)	Resolusi ini mengecam Korea Utara untuk menghentikan ambisi nuklirnya dan fokus pada kesejahteraan rakyatnya. Bentuk sanksi pun semakin di perluas dengan melarang Korea Utara untuk mengekspor bahan tembaga, nikel dan perak. Selain itu Korea Utara juga dilarang terlibat dalam sistem jual beli apapun yang berkaitan dengan program persenjataan. Negara-negara anggota juga diminta untuk membatasi jumlah rekening bank yang dimiliki oleh diplomat atau utusan dari Korea Utara, serta menanggukkan kerjasama dalam bidang ilmiah dengan Korea Utara kecuali demi tujuan medis.

Sumber : Kelsey Davenport, *UN Security Council Resolution on North Korea*, Arms Control Association, diakses dalam <https://www.armscontrol.org/factsheets/UN-Security-Council-Resolutions-on-North-Korea> (5/2/2019, 23:52 WIB)

3.3 Peran Amerika Serikat Sebagai Negara Dominan

Kehadiran negara yang paling mendominasi dalam rezim, tentunya akan mempermudah jalan dari rezim itu sendiri terkait mempengaruhi negara lain untuk tetap tunduk patuh dalam aturan yang berlaku. Aktor yang paling mendominasi disini telah di ibaratkan sebagai pemeran utama dalam perjalanan panjang dari sebuah rezim. Hadirnya aktor yang mendominasi dengan segala *power* yang ia miliki nyatanya hingga saat ini mampu membantu dalam memperkokoh pondasi rezim. Dalam hal ini, sang aktor pemeran utama yang dimaksud adalah Amerika Serikat,

Sudah bukan menjadi rahasia lagi, bagaimana besarnya pengaruh yang di berikan oleh Amerika Serikat dalam ruang lingkup dunia internasional. Bahkan sangking besarnya *power* yang mereka miliki membuat mereka kerap kali di juluki sebagai negara adidaya. Tidak hanya dalam lingkup hubungan bilateral nya, pengaruh Amerika Serikat juga dapat jelas terlihat dari hadirnya ia sebagai salah satu anggota tetap dari Dewan Keamanan PBB. Kehadiran Amerika Serikat di tengah-tengah DK PBB semakin menambah bukti betapa besarnya pengaruh yang di ciptakan oleh Amerika Serikat. Belum lagi markas PBB yang terletak di salah satu kota terbesar di Amerika Serikat yaitu di New York semakin menambah kesan bahwa sesungguhnya PBB memang telah di kendalikan oleh Amerika Serikat.

Amerika Serikat juga merupakan salah satu penyumbang dana terbesar dalam PBB. Setiap tahun Amerika Serikat menyumbang sekitar \$ 8 miliar, dimana hampir sebagian besarnya yaitu sekitar \$ 3 miliar digunakan untuk

anggaran rutin dan pemeliharaan perdamaian PBB.¹⁴⁵ Pesatnya tingkatan dana yang di sumbangkan dalam anggaran belanja PBB menentukan seberapa berpengaruhnya negara tersebut dalam struktur PBB. Sudah bukan menjadi rahasia lagi, mengingat PBB cukup sangat menggantungkan dirinya terhadap kontribusi dari negara-negara anggota, dan hal itulah yang menjadi salah satu penyebab PBB kurang dapat mengambil keputusan yang adil dalam menentang setiap kebijakan dari Amerika Serikat. Beberapa tahun silam sempat terjadi penurunan dana anggaran PBB yang di akibatkan posisi PBB yang berseberangan dengan kepentingan Amerika Serikat. Ketika itu Amerika Serikat cukup marah pada PBB dan berdampak pada hilangnya 22% anggaran belanja PBB yang setara dengan US\$ 1 miliar.¹⁴⁶ Di era kepemimpinan Boutros-Boutros Ghali, sempat terjadi sedikit perselisihan antara PBB dan Amerika Serikat terkait prakarsa diplomatik di bidang operasi pemeliharaan perdamaian.¹⁴⁷ Prakarsa tersebut oleh Amerika Serikat dinilai cukup merugikan karena akan berdampak terhadap berkurangnya pengaruh Amerika Serikat di lingkungan politik internasional. Amerika Serikat menuntut agar prakarsa tersebut direvisi, namun Boutros-Boutros Ghali yang bertindak sebagai Sekretaris Jendral PBB tetap menolak usulan revisi tersebut. Akibat dari penolakan itu, Amerika Serikat memutuskan untuk menunda pembayaran kontribusi wajibnya. Sejak saat itulah PBB mengalami krisis keuangan yang cukup parah yang mengakibatkan berbagai operasi pemeliharaan

¹⁴⁵ *America, we pay way too much for the United Nations*, diakses dalam <https://www.foxnews.com/opinion/america-we-pay-way-too-much-for-the-united-nations> (21/10/2019, 22:03 WIB)

¹⁴⁶ *Ibid.*

¹⁴⁷ *Boutros Boutros-Ghali, Turning Point In the United Nations*, diakses dalam <https://www.sidint.net/content/boutros-boutros-ghali-turning-point-united-nations-0> (21/10/2019, 22:41 WIB)

perdamaian di beberapa negara mengalami hambatan yang sangat berat. Beberapa saat kemudian atau tepat sejak posisi Boutros-Boutros Ghali digantikan oleh Kofi Annan, PBB dapat kembali terarah semakin membaik, dan hubungan antara PBB dan Amerika Serikat juga kembali membaik.¹⁴⁸ Segala ketentuan-ketentuan yang sekiranya bertentangan dengan Amerika Serikat mulai diganti dan di reformasi. Setelah semua kejadian itu akhirnya Amerika Serikat pun memutuskan untuk kembali membayar tunggakannya secara berangsur.



¹⁴⁸ *Kofi Annan: His Legacy is Not Perfect, But He Helped Improve Millions of Lives*, diakses dalam <https://theconversation.com/kofi-annan-his-legacy-is-not-perfect-but-he-helped-improve-millions-of-lives-101779> (21/10/2019, 23:15 WIB)